

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang ada, terdapat beberapa persoalan penting yang dapat dipahami terkait dengan adanya upaya pemerintah dalam memenuhi hak dari kelompok difabel, khususnya pada program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Magelang dan Dinas PPPKKBPA Kabupaten Magelang. Setiap pemerintah daerah tidak memiliki responsivitas yang sama dalam menanggapi persoalan difabel. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang berbeda di setiap daerahnya. Dalam hal ini, adanya perbedaan responsivitas Pemerintah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang didorong oleh aspek pengasuhan dan bimbingan fisik, mental, spiritual, serta sosial kepada difabel.

Terdapat implikasi dari berjalannya program rehabilitasi sosial di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Dengan adanya perhatian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Magelang kepada kelompok difabel menjadi peluang untuk teman-teman difabel untuk semakin memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi mereka. Implikasi lainnya, yaitu dengan berbedanya fokus pelaksanaan program rehabilitasi sosial membuat banyaknya tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Relawan Atensi di Kota Magelang. Banyaknya tanggung jawab tersebut membuat kurang optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu, dengan melihat kondisi yang ada di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang lebih responsif dibandingkan dengan Pemerintah Kota Magelang. Hal tersebut didukung dengan adanya regulasi yang mengatur pemenuhan hak kelompok difabel yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada persoalan anggaran, sumber daya manusia, dan bagaimana komitmen dari pemerintah itu sendiri.

Dapat disampaikan juga bahwa terdapat perbedaan koordinasi antar sektor dalam upaya pemenuhan kesejahteraan kelompok difabel di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Perbedaan koordinasi tersebut dapat dilihat dari Pemerintah Kabupaten Magelang yang mampu menjangkau berbagai pihak untuk dapat terlibat dalam proses pemenuhan kesejahteraan dari kelompok difabel dan aktif dalam mendukung pengembangan potensi dari kelompok difabel. Sedangkan di Kota Magelang masih belum bisa untuk melakukan koordinasi dengan berbagai sektor pemerintahan sehingga sangat terlihat banyaknya beban yang dimiliki oleh Relawan Atensi di Kota Magelang.

Dalam hal ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana upaya dari pemerintah dalam pemenuhan hak kelompok difabel. Terlebih kelompok difabel yang memiliki berbagai keterbatasan dan masih kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Pemerintah harus bisa melibatkan berbagai elemen baik di sektor pemerintahan ataupun masyarakat dalam upaya pemenuhan hak tersebut. Selain itu, sudah seharusnya faktor penting dalam responsivitas yang diberikan oleh pemerintah bukan muncul dari kelompok

difabel terlebih dahulu, namun muncul dari kesadaran pemerintah itu sendiri dalam memenuhi berbagai hak dari kelompok difabel.

